KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Sahkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta UU Pertahanan
Tanggal : Sabtu, 30 Maret 2019
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

DPR Sahkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta UU Pertahanan

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan dan menyetujui dua Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

Kedua RUU yang disahkan menjadi UU, yaitu RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, disetujuinya RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah.

"Dengan demikian jemaah dapat menunaikan ibadah mereka sesuai dengan ketentuan syariat, serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah," kata Bambang saat membacakan pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui untuk menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebab UU yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan menjawab berbagai tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Sementara itu, dengan disahkannya RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan diharapkan akan meningkatkan kerja sama saling menguntungkan dalam bidang industri pertahanan.

Pimpinan DPR RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan Komisi I DPR RI dalam menyelesaikan RUU tersebut.

"Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Fraksi, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR atas dukungan dan kerja samanya," ajak Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu.



ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna ke-8 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2018-2019 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta

Aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Untuk itulah, RUU Kerja Sama Indonesia dengan Rusia di Bidang Pertahanan kemudian disetujui. DPR berharap dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, kemampuan pertahanan Indonesia semakin meningkat. Hal itu dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia.

Selanjutnya, Pimpinan DPR mengharapkan kepada seluruh anggota yang akan melakukan kunjungan kerja pada masa reses untuk mensosialisasikan UU tersebut kepada masyarakat.

Terkait fungsi anggaran, Bamsoet menjelaskan saat ini, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020 masih dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan oleh pemerintah.

RAPBN Tahun Anggaran 2020 akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Untuk itu, DPR RI mengimbau agar pemerintah memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dasar penyusunan pembangunan nasional sesuai dengan tema Pembangunan tahun 2020, yaitu peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan berkualitas.

Di sisi lain, Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi pada tanggal 6 Maret 2019 telah menyetujui penambahan Provinsi DKI Jakarta, sebagai objek pemantauan bagi Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Bamsoet juga mewakili Pimpinan dan Anggota DPR RI menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarganya atas bencana banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua.

"Kami berharap pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dapat bergerak cepat melakukan upaya penanganan korban yang terdampak bencana tersebut,"

Pimpinan Dewan juga menyampaikan duka cita yang sangat mendalam kepada korban aksi terorisme berupa penembakan yang sangat brutal terhadap umat Islam di masjid Christchurch, Selandia Baru, khususnya kepada 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban.

Bamsoet yakin, mereka semua yang menjadi korban akan menjadi syahid di hadapan Allah SWT, Tuhan Yang MahaKuasa.

Atas peristiwa biadab yang tidak berperikemanusiaan tersebut, Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI mengutuk keras serta mengajak semua bangsa di dunia untuk bergandeng-tangan melawan setiap aksi terorisme dimanapun mereka berada.

"Terorisme merupakan musuh bersama bangsa di dunia, terlepas dari apa pun agama, etnik, warna kulit, dan negaranya," tegas politisikus Partai Golkar itu.

Bamsoet kembali mengingatkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPR RI terus berupaya meningkatkan transparansi dan aksesibilitas rakyat terhadap kinerja DPR RI sekaligus menguatkan pondasi sebagai parlemen terbuka dan modern.

Semua persidangan di DPR RI saat ini sudah bisa disaksikan secara *real time* oleh masyarakat melalui aplikasi *DPR Now!* untuk memudahkan rakyat memantau dan mengawasi kinerja Anggota DPR RI.

"Aplikasi ini merupakan wujud 'DPR Dalam Genggaman Rakyat' yang menjadi komitmen seluruh anggota Dewan selama ini. Masyarakat dapat datang langsung ke Pusat Informasi dan Penyiaran Parlemen. Kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengunjungi Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP) bagi yang membutuhkan," pesan Bamsoet. (RO/Try/S2-25)